

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
DAN PANGAN)**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 05
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 1 April 2015
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: Membahas Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 dan Tindak Lanjut atas diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster ( <i>Panulirus spp</i> ), kepiting ( <i>Scylla spp</i> ) dan rajungan ( <i>Portunus Pelagius spp</i> ) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela ( <i>Trawl</i> ) dan Pukat Tarik ( <i>Seine Net</i> ) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Ketua Rapat	: Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	: A. 41 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Pemerintah: 1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan); 2. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Sekretaris Jenderal); 3. Andha Fauzie M, Ak.,M.S.I.S (Inspektur Jenderal); 4. Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap); 5. Dr. Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya); 6. Laksda TNI (Purn) Asep Burhanuddin. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan); 7. Ir. Saut Parulian Hutagalung, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan); 8. Dr. Sudirman Saad, SH. M.Hum. (Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); 9. Dr. Ir. Suseno, MM (Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); 10. Dr. Ir. Ahmad Poernomo, M.App.Sc. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan); dan 11. Narmoko Prasmadji SH., MH. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 dan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015, pada hari Rabu tanggal 1 April 2015, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara terus menerus sampai pada akar masalahnya, termasuk langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelesaian masalah hukum terhadap kapal asing MV. Hai Fa. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan data-data secara tertulis pelaku-pelaku *IUU Fishing*, baik yang sudah terbukti maupun yang terindikasi melakukan *IUU Fishing*.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat program dan kegiatan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), kepiting (*Scylla spp*), dan rajungan (*Portunus Pelagius spp*) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Net's*) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat kajian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2015, dan Nomor 2 Tahun 2015 termasuk reklamasi wilayah pesisir.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 ke Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**SUSI PUDJIASTUTI**

KETUA RAPAT,

Ttd.

**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**

A-335

